

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara maju yang kuat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan militer. Pasca perang dunia ke II, Amerika Serikat muncul sebagai negara yang kuat setelah keluar sebagai pemenang dalam perang dunia ke II yang berhasil mengalahkan Jepang dan Jerman. Akibat dari perang dunia II menjadikan negara-negara di Eropa banyak yang hancur yang mengakibatkan merosotnya perekonomian Eropa pada saat itu. Namun hal ini tidak berlaku bagi Amerika Serikat, hal ini dikarenakan wilayah administratif Amerika Serikat sama sekali tidak terkena dampak dari perang. Amerika Serikat juga menyadari setelah perang dunia II ekonomi dunia lumpuh sehingga pasar untuk memasarkan produk-produk asal Amerika Serikat menjadi terbatas. Amerika Serikat kemudian memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Eropa melalui *Marshall Plan*, selain membantu memulihkan perekonomian Eropa bantuan ini juga berdampak baik bagi perekonomian di Amerika Serikat dimana produk-produk yang dipasarkan dapat membuka pasar bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian merekonstruksi pengaturan sistem moneter internasional yang sekarang ini dikenal dengan IMF dan Bank Dunia yang merupakan institusi yang dirancang untuk memastikan perekonomian yang kapitalis pada dunia internasional (Conte & Karr).

Keberhasilan perekonomian Amerika Serikat tidak hanya terbatas dalam politik, ekonomi dan militer tetapi juga pada teknologi. Teknologi berkembang dengan pesat di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Hal ini terbukti dengan dihasilkannya berbagai produk elektronik baru yang lebih canggih serta inovasi dari pengembangan telekomunikasi dan jaringan komputer. Pengembangan ini kemudian memunculkan industri yang

memproduksi perangkat keras dan lunak yang kemudian mengubah operasi industry menjadi revolusioner.

Selama bertahun-tahun Amerika Serikat mendominasi dalam dunia internasional setelah kemenangannya dalam perang dingin dengan Uni Soviet. Hingga pada abad ke 20 Cina muncul sebagai pesaing baru bagi Amerika Serikat. Melalui pertumbuhan ekonominya yang tumbuh dengan pesat dan mampu menyaingi Amerika Serikat. Cina semakin menunjukkan eksistensinya dalam dunia Internasional melalui penguatan ekonomi dan militernya. Hubungan Amerika Serikat dan Cina memanas ketika Cina secara terang-terangan menyatakan kepemilikannya atas Laut Cina Selatan. Dimana klaim tersebut juga mengklaim kepulauan Jepang tempat tentara Amerika Serikat berada untuk menjaga kepulauan Jepang. Hubungan ekonomi keduanya juga tidak baik ketika Cina mampu menandingi dominasi Amerika Serikat melalui ekonominya dengan produk-produk Cina yang lebih banyak diminati dalam dunia Internasional. Amerika Serikat merasa tersaingi dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang setiap tahun terus tumbuh dengan pesat. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Salah satunya dengan melakukan pemblokiran terhadap perusahaan besar Cina yaitu Huawei yang merupakan perusahaan teknologi. Pemblokiran ini dilakukan karena Amerika menuduh oleh Huawei Technologies Co Ltd sebagai mata-mata Cina. Tuduhan tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Undang-undang mengenai Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional dimana presiden memiliki wewenang untuk mengatur perdagangan dalam menghadapi keadaan darurat nasional yang mengancam negara (CNN, 2019).

Ketidak ikut sertaan Huawei menjadikan pesaing Huawei seperti Nokia, Ericsson, Verizon, AT&T menjadi kehilangan satu pesaingnya dalam pengembangan teknologi 5G. Namun meskipun begitu, produk-produk Huawei mengalami peningkatan penjualan sementara pangsa pasar dalam

penjualan Apple yang merupakan produk Amerika Serikat menurun sebanyak 35% pada bulan November 2019 (Doffman, 2019). Apple semakin kehilangan pasarnya setelah Huawei muncul sebagai perusahaan teknologi dengan produk-produk terbaru yang canggih dengan harga yang tidak terlalu mahal. Amerika Serikat berusaha untuk mendorong pengembangan teknologi 5G dengan menyusun rancangan undang-undang yang mendorong pemerintah federal mengalokasikan dana sebesar \$1 miliar untuk pengembangan 5G (Statt, 2020). Amerika Serikat berharap perusahaan seperti Ericsson dan Nokia dapat mendukung pengembangan 5G. Pemblokiran Huawei ini merupakan bentuk dari memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina dimana Cina sudah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang hampir menyamai Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan posisinya karena hampir seluruh produk Cina di Amerika Serikat lebih diminati karena harga yang lebih murah.

Meskipun begitu, beberapa negara di Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Belanda enggan untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh Trump karena menganggap setiap perusahaan swasta dapat ikut dalam pengembangan jaringan 5G selama perusahaan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga pada tahun 2017, pemerintah Inggris masih mengkaji ulang mengenai sejauh mana teknologi 5G yang dikembangkan oleh Huawei dapat digunakan dan dikembangkan di Inggris (Welle, 2019).

Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Muda Inggris untuk Bidang Ekonomi John Glenn bahwa Inggris ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara di Asia terutama dalam hal perdagangan, karena Asia merupakan mitra dagang Inggris yang penting. Hal ini menjadi momentum yang sangat pas bagi Cina untuk kembali memperkuat pengaruhnya pada pasar Inggris pasca Brexit.

Hubungan Inggris dan Cina pasca Brexit justru semakin membaik karena Cina merupakan mitra dagang kedua terbesar bagi Uni Eropa setelah

Amerika Serikat (BBC, 2016). Hal ini ditandai dengan kerjasama pengembangan teknologi 5G oleh satu perusahaan asal Cina yaitu Huawei. Meski sebelumnya, Huawei dicekal oleh beberapa negara di Eropa karena Amerika Serikat menuduh Huawei melakukan tindakan memata-matai aktivitas Amerika Serikat. Namun Inggris justru memberikan izin kepada perusahaan asal Cina tersebut untuk dapat mengembangkan inovasi teknologi 5G di Inggris. Keputusan ini diambil oleh Boris Johnson selaku Perdana Menteri Inggris untuk mengurangi biaya pengembangan teknologi 5G.

Inggris menganggap biaya yang ditawarkan oleh Huawei untuk pengembangan teknologi 5G menjadi lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang direkomendasikan oleh Amerika Serikat seperti Ericsson dan Nokia. Keputusan Inggris tersebut disambut baik oleh perusahaan asal Cina tersebut. Huawei sendiri juga memastikan keputusan Inggris tersebut merupakan langkah yang benar dimana Wakil Presiden Victor Zhang menyatakan: “Keputusan berdasarkan bukti ini akan menghasilkan infrastruktur telekomunikasi yang lebih maju, lebih aman dan lebih hemat biaya yang sesuai untuk masa depan” (Warta, 2019).

Hal tersebut membuat presiden Trump marah besar dengan Perdana Menteri Inggris yang menganggap kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Inggris merupakan langkah yang salah dimana hal tersebut tentu dapat mengganggu stabilitas keamanan negaranya serta membahayakan kegiatan intelijen trans-atlantik. Masuknya Huawei menjadikan Trump menjadi cemas karena dengan hubungan China dan Inggris yang semakin dekat akan menjadikan pengaruh Cina semakin meluas terutama di Eropa. Cina secara agresif berusaha untuk mendominasi perekonomian dalam dunia Internasional dengan tujuan agar negara-negara dunia semakin terikat dengan kekuatan ekonomi Cina. Hal ini kemudian akan lebih memudahkan Cina dalam mencapai kepentingannya yaitu mendorong pembaharuan tatanan politik dunia yang lebih melayani kepentingannya. Dimana hal ini kemudian akan menjadikan pusat

tatanan ekonomi dunia akan beralih dari Amerika Serikat dan Eropa menuju ke Asia. Selain itu, Inggris yang juga merupakan aliansi dari jaringan Intelijen *Five Eyes* yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru dimana negara-negara tersebut sepakat untuk membagi hasil intelijen atau sadapan satu sama lain (NCSC, n.d.) Jika Inggris mengizinkan Huawei maka Amerika Serikat khawatir kegiatan intelijen akan bocor karena Amerika Serikat menganggap Huawei merupakan mata-mata Cina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, muncul pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah: **Bagaimana strategi Amerika Serikat dalam membendung ekspansi Huawei di Inggris?**

C. Landasan Teori

Dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan *Konsep Politik Luar Negeri*.

1. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuannya dalam hubungannya dengan entitas eksternal (Oxford, 2016). Kedaulatan Politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dari kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri lebih menekan pada *action* yang diambil oleh suatu negara dalam lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri sendiri menekankan secara lebih luas yang didasarkan pada kemampuan atau pengaruh yang dimiliki oleh setiap negara. Politik luar negeri juga ditentukan oleh perilaku para pemimpin dan perangkat perumus kebijakan dalam suatu negara untuk menentukan perilaku atau tindakan negara itu sendiri namun dalam beberapa kasus pertimbangan ideologi dan konfigurasi kekuatan umum, pengaruh dominasi dan subordinasi-nya ke seluruh dunia selain itu politik luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, kelembagaan, pengaruh media dan birokrasi politik (Morin & Paquin, 2018). Politik luar negeri dipandang sebagai instrumen untuk melayani kepentingan

vital negara, yang diarahkan secara khusus untuk menjamin keamanan atau memaksimalkan kekuasaan (Morin & Paquin, 2018).

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton politik luar negeri merupakan strategi atau tindakan yang direncanakan oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain atau entitas internasional, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Plano & Olton, 1988). Langkah utama dalam politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional meliputi:

- a) Mempertimbangkan kepentingan nasional ke dalam tujuan dan sasaran tertentu.
- b) Menentukan faktor-faktor situasi internasional dan domestik yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
- c) Menganalisis kemampuan negara untuk mencapai kepentingan.
- d) Mengembangkan rencana atau strategi untuk menggunakan kemampuan negara dalam menangani variabel-variabel untuk mencapai tujuan.
- e) Melakukan tindakan yang diperlukan.
- f) Secara berkala meninjau dan mengevaluasi kemajuan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan.

Dalam politik luar negeri terdapat 3 instrumen politik luar negeri yang dapat digunakan oleh negara yaitu (Morin & Paquin, 2018):

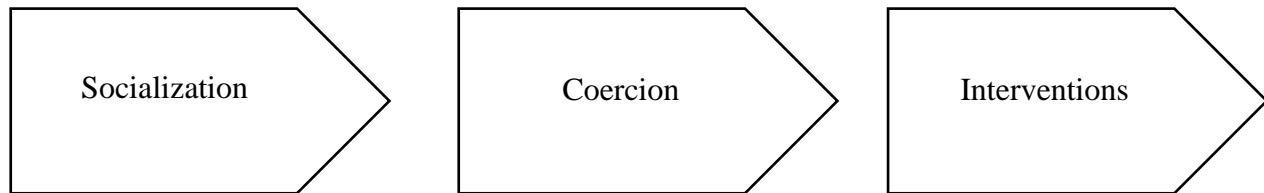
1. **Sosialisasi (Socialization)**, dimaknai sebagai perpindahan kepercayaan, gagasan, nilai dan ide dari satu negara ke negara lainnya. Pada tahap penyebarannya suatu negara secara aktif menyebarkan pahamnya. Kebanyakan negara menggunakan tindakan retorik yang terdiri dari seperangkat argumen untuk mencapai tujuan yang kemudian akan mempengaruhi diskusi ke arah tertentu. Tindakan ini dapat menyebabkan beberapa aktor atau

negara mengubah mengubah perilakunya. Tindakan ini tidak hanya digunakan oleh negara yang lemah tapi juga digunakan oleh negara *great power* secara konstan.

2. **Paksaan atau Kekerasan (*Coercion*)**, tindakan ini dirancang agar mempengaruhi bagaimana negara tujuan berperilaku dengan mengubah cara penghitungan kepentingannya, tanpa campur tangan langsung di wilayah negara tujuan tersebut. *Coersion* dibagi menjadi 5 bagian yaitu (Morin & Paquin, 2018):
 - a. Pertama, mengacu pada idiom “*carrot and stick*”, dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa sanksi positif dengan strategi menggunakan penghargaan atau *reward* dan sanksi negatif untuk mendorong perilaku tertentu dengan strategi memberikan hukuman.
 - b. Kedua, kontras atau perbedaan pada sanksi ancaman yang diberikan dengan penerapan yang sebenarnya. Dimana sanksi berupa ancaman yang diberikan biasanya menghasilkan hasil yang berbanding terbalik dengan penerapannya.
 - c. Ketiga, melalui paksaan yang bertujuan untuk mempertahankan status quo yang dikenal dengan *dissuasion*, tetapi memiliki keunggulan yaitu sebagai suatu bentuk paksaan yang bertujuan untuk mengubah.
 - d. Keempat, Logika yang diadopsi berbeda dimana dalam tindakan yang diambil berbeda untuk setiap permasalahan karena adanya perbedaan kepentingan.
 - e. Kelima, sanksi khusus yang menargetkan para elit dan yang menargetkan seluruh populasi.
3. **Intervensi (*Interventions*)**, usaha suatu negara untuk masuk ke dalam urusan dalam negeri negara lain untuk membawa perubahan struktural internal. Intervensi dibedakan menjadi intervensi politik dan intervensi militer. Intervensi politik menargetkan subversi

dengan mendukung kelompok pembangkang, atau stabilisasi dengan mendukung kekuatan penguasa yang lemah. Bertentangan dengan kebijaksanaan umum, sebagian besar intervensi militer pada saat ini tidak mengarah pada perang. Bentrokan perbatasan dan manuver di wilayah asing bisa saja menjadi strategi untuk menguji tekad negara untuk mempertahankan perbatasan yang disengketakan. Selain itu, blokade maritim dapat dengan mudah digunakan untuk memaksa negosiasi dengan menghindari konfrontasi langsung. Melakukan perang adalah keputusan ekstrim, yang relatif jarang dilakukan pada masa sekarang ini (Morin & Paquin, 2018). Tindakan intervensi militer biasanya diambil sebagai bentuk reaksi yang gagal terhadap sosialisasi dan ancaman.

Gambar 1.1 Instrumen politik luar negeri



Sumber: Jean Frederic Morin & Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A toolbox*, Palgrave Macmillan:United Kingdom, 2018.

Dalam membendung Cina di Inggris, Amerika Serikat melakukan pemblokiran terhadap Huawei yang merupakan perusahaan besar asal Cina. Hal ini didasarkan pada politik luar negeri Amerika Serikat untuk membendung semakin meningkatnya perekonomian Cina dan buntut dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Amerika Serikat berusaha untuk menekan pengaruh dominasi Cina yang sudah mulai merambah ke Eropa. Amerika Serikat telah menyusun strategi untuk membendung Cina di negara-negara Eropa dengan melakukan pemblokiran terhadap Huawei dengan alasan Huawei dijadikan sebagai mata-mata bagi Cina. Dalam mencapai politik luar negerinya, Amerika Serikat pada awalnya menggunakan sosialisasi sebagai cara untuk

mempengaruhi negara-negara agar tidak menggunakan Huawei dalam pengembangan teknologi di negara mereka karena dapat mengancam stabilitas keamanan. Langkah pertama ini dinilai efektif bagi sebagian besar negara terutama negara-negara dengan *power* yang lemah. Namun untuk beberapa negara yang memiliki *middle power* dan *super power* masih berpikir untuk mempertimbangkan pengembangan teknologi 5G dengan Huawei untuk alasan utama biaya yang ditawarkan oleh Huawei lebih murah. Sehingga Amerika Serikat mengambil langkah selanjutnya yaitu *coercion* yaitu dengan berusaha agar mempengaruhi agar negara-negara yang masih mempertimbangkan Huawei seperti Inggris untuk mengubah sikapnya. Tindakan Inggris mengizinkan Huawei untuk mengembangkan 5G menuai protes keras dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian menggunakan strategi *coercion* agar Inggris mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut. Meskipun Donald Trump marah besar dengan Perdana Menteri Inggris pada saat itu, namun Amerika Serikat masih berusaha melakukan diplomasi dengan Inggris melalui peringatan-peringatan akan bahaya dalam mengizinkan Huawei.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori diatas mengenai Strategi Amerika Serikat dalam membendung Huawei di Inggris maka dapat ditarik hipotesa bahwa:

1. Dalam mencapai politik luar negerinya Amerika Serikat menggunakan instrumen Sosialisasi (*Socialization*) dengan memperingatkan dan menghimbau Inggris terhadap bahaya mengizinkan Huawei dalam pengembangan jaringan 5G.
2. Amerika Serikat menggunakan Paksaan (*Coercion*) dalam mencegah ekspansi produk teknologi informasi Cina di Inggris dengan mengancam Inggris dan melakukan protes keras pasca Inggris mengizinkan Huawei dalam pengembangan 5G.

E. Batasan Penelitian

Penulisan ini mempunyai jangkauan penelitian meliputi apa saja strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membendung Huawei di Inggris pada tahun 2017-2020. Tahun 2017 merupakan awal memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina dalam hal perdagangan hingga tahun 2020 yang mengakibatkan Huawei juga ikut terlibat dalam perang dagang antara keduanya. Tahun 2017-2020 merupakan puncak dari gencarnya Amerika Serikat untuk menghalangi Huawei di Inggris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Jenis penelitian ini membutuhkan pengumpulan data supaya dapat menjelaskan lebih rinci untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif ini bersifat eksplisit dengan situasi yang terbatas dengan menggambarkan fenomena secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan yaitu bersumber dari Studi Kepustakaan, yaitu melalui buku-buku, jurnal dan media cetak maupun media elektronik. Penggunaan media elektronik digunakan untuk mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu untuk mendukung penelitian penulis. Data-data yang penulis gunakan melalui buku-buku, jurnal dan media cetak maupun elektronik bersifat relevan dengan masalah yang akan dikaji.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memahami strategi Amerika Serikat dalam membendung Huawei yang merupakan perusahaan asal Cina dengan pelarangan Huawei di Inggris.

2. Mengetahui upaya atau langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat setelah Inggris melakukan Kerjasama pengembangan 5G dengan Huawei yang merupakan perusahaan asal Cina.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkategorikan pembahasan dalam lima bab:

BAB I atau pendahuluan, memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, teori atau kerangka konseptual, hipotesa, batasan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris sebelum Amerika Serikat menyatakan memblokir Huawei.

BAB III, membahas mengenai masuknya Huawei yang merupakan perusahaan Cina pasca Brexit di Inggris yang mengancam Amerika Serikat.

BAB IV, akan diuraikan pembahasan mengenai strategi Amerika Serikat dalam membendung ekspansi Huawei di Inggris.

BAB V, berisi kesimpulan dari keseluruhan BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.